

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, cetakan pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD Tahun 1945 Dengan Delapan Negara Maju*, cetakan pertama, Jakarta: Kencana, 2009.

Achmad Fauzi, *Hukum Lembaga Kepresidenan*, cetakan pertama, Semarang: Fakultas Hukum Univeristas 17 Agustus 1945, 2007.

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Jiid I*, cetakan pertama, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Herman Sihombing, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, cetakan pertama, Jakarta: djambatan, 1996.

Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, cetakan pertama, Jakarta: Aksara Baru, 1986.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, cetakan pertama, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

_____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.

Joeniarto, *Negara Hukum*, cetakan pertama, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1960.

M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, cetakan pertama, Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, cetakan pertama, Yogyakarta: UII Press, 2005.

_____, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Jakarta: FH UII Press, 2003.

_____, *Hukum Tata Negara di Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

_____, *Hukum Tata Negara*, cetakan pertama, Yogyakarta: PSH FH UII, 1999.

Sarja, *Negara Hukum*, cetakan pertama, Yogyakarta: Thafa Media, 2016.

Sawitri suparti sadajoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung: Refika Aditam, 2005.

Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang atau Perpu*, cetakan pertama, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2003.

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962.

B. Jurnal / Makalah/ Hasil Penelitian

Aidul FA,” Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, NO. 4 VOL. 19, 2012.

Almanar, Husni Jalil², dan M. Nur Rasyid, Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, No. 2 Vol. 3, 2015.

Anak Agung Wiwik Sugiantari, “Kewenangan Presiden dalam Membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang”, *Gane Swara*, Edisi Khusus No. 3 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram, Desember 2009.

Janpatar Simamora, “ Multitafsir Pengertian Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Dalam Penerbitan Perppu” *Mimbar Hukum*, Nomor 1 Volume 22, Februari 2010.

Jimly Asshiddiqie, “Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer”, Orasi ilmiah Pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004. Bandingkan dengan Plato, 1986, *The Laws*, Penguin Classics, diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders.

M. Syarif Nuh, “Hakekat Keadaan Darurat Negara (*state of emergency*) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Jurnal Hukum*, Nomor 2 Volume 18, april 2011.

Muhammad Siddiq, “Kegentingan Memaksa atau Kepentingan Penguasa”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*”, Vol. 48 No. 1, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Darussalam, 2014

Muntoha, “Demokrasi dan Negara Hukum”, *jurnal hukum*, Edisi No.3 Vol. 16, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009.

S. F. Marbun, “Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 9 Vol 4, 1997.

Soenobo Wiryosoegito dan Noer Indriati, “Pembatasan-pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden Sesudah Perubahan UUD 1945, *Jurnal Idea Hukum*, Edisi Vol. 1 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, 2015.

Soentanto Soepiadhya, “Kekuasaan Eksekutif Setelah Perubahan UUD Tahun 1945 Dalam Prospek Pemerintahan Demokratis”, *Jurnal Yustika*, Vol. 12 No. 1, 2009.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

D. Data Elektronik

<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1570>

<http://harian.analisadaily.com/opini/news/urgensi-perppu-kebiri/242238/2016/06/08>

<http://www.kbbi.web.id/jahat>

http://www.kompasiana.com/ciehoey/kasus-yuyun-dan-peliknya-cara-berfikir-masyarakat_572ec01b2bb0bd5b05f044c9

<https://www.rappler.com/indonesia/110227-pro-kontra-hukuman-kebiri>

<http://www.rappler.com/indonesia/134251-joko-widodo-sahkan-perpu-kebiri>

<http://sketsanews.com/559562/kajian-kritis-kejahatan-seksual-hingga-kebiri-dalam-sudut-pandang-psikologi-dan-sosiologi/>

<https://tirto.id/urgensi-perppu-kebiri-biQQ>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_Indonesia

E. Wawancara

Wawancara dengan Prof. Ni'matul Huda, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Di Yogyakarta, 5 Desember 2016

Wawancara dengan Drs. Dr. Muntoha, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Di Yogyakarta, 5 Desember 2016